



Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) di Kabupaten Indragiri Hulu

Amalia Luthfiah Hananti^{1*}, Sujianto²

^{1,2}Universitas Riau, Indonesia

E-mail: amalia.luthfiah2141@student.unri.ac.id¹, sujianto@lecturer.unri.ac.id²

Alamat: Kampus Bina Widya KM.12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

*Korespondensi penulis: amalia.luthfiah2141@student.unri.ac.id

Abstract. *Indragiri Hulu Regency is one of the districts in Riau Province which is the most extensive district for forest and land fires in 2024. There are problems, namely the lack of human resources who have disaster competence, the lack of training for the task force, the lack of dissemination of disaster-prone information, facilities and infrastructure that are not enough. The purpose of this study was to determine how the management of forest and land fire disaster management carried out by the Regional Disaster Management Office (KPBD) of Indragiri Hulu Regency and to find out the obstacles faced. This research uses disaster management theory proposed by Neil Grig which consists of planning, organizing, leadership, coordinating, controlling, supervising, budgeting, finance. This research uses descriptive qualitative research methods, and data obtained through interviews, observation, and documentation. From the results of this study, it can be seen that the management of forest and land fire disaster management carried out by the Regional Disaster Management Office (KPBD) of Indragiri Hulu Regency is quite good, but there are obstacles such as a fairly limited budget, limited facilities and infrastructure that are quite adequate, the difficulty of the terrain, and the lack of awareness of the community in disaster management of forest and land fires in Indragiri Hulu Regency.*

Keywords: *Disaster Management, Forest Fires, Management.*

Abstrak. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang menjadi kabupaten paling luas terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2024. Terdapat permasalahan yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi kebencanaan, kurangnya pelatihan kepada satgas, masih kurangnya penyebarluasan informasi rawan bencana, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana yang dikemukakan oleh Neil Grig yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran, keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik, namun terdapat hambatan seperti anggaran yang cukup terbatas, keterbatasan sarana dan prasarana yang cukup memadai, sulitnya medan tempuh, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata kunci: Kebakaran Hutan, Manajemen, Penanggulangan Bencana.

1. LATAR BELAKANG

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana tahunan yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam maupun perbuatan manusia. Fenomena El Niño Southern Oscillation (ENSO) memperpanjang musim kemarau dan mengurangi curah hujan, membuat vegetasi kering dan mudah terbakar. Sementara itu, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar serta kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan turut memperparah kejadian ini. Dampak kebakaran hutan sangat luas, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kerusakan ekosistem, polusi udara, dan peningkatan suhu global menjadi dampak ekologis yang serius, sementara gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta kerugian ekonomi akibat terganggunya sektor pertanian dan perkebunan semakin memperburuk kondisi.

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan terhadap karhutla, mengingat luasnya lahan gambut yang mencapai 5,09 juta hektare atau 56,42% dari total lahan gambut di Sumatra. Keadaan ini diperburuk oleh kondisi alam yang mendukung kebakaran serta praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa luas area terbakar di Riau mengalami peningkatan signifikan dari 1.456,52 hektare pada 2021 menjadi 2.486,75 hektare pada 2024. Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan kebakaran terluas pada 2024, menjadikannya lokasi penelitian yang relevan dalam memahami penyebab dan dampak bencana ini.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, peningkatan luas area kebakaran terlihat dari data 2021 hingga 2023, dengan lonjakan dari 71,19 hektare menjadi 578,14 hektare. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 145 titik panas di wilayah ini pada 2023, yang menandakan tingginya potensi kebakaran. Kekeringan ekstrem dengan suhu udara mencapai 36°C turut memperparah keadaan. Selain itu, pola pembukaan lahan dengan cara membakar serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan semakin meningkatkan risiko kebakaran. Akibatnya, tidak hanya vegetasi yang hangus, tetapi juga habitat satwa liar ikut musnah, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem.

Analisis risiko menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Indragiri Hulu memiliki tingkat bahaya kebakaran yang bervariasi dari sedang hingga tinggi. Kecamatan dengan potensi bahaya tertinggi adalah Batang Gansal dengan luas 136.532 hektare. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini juga berdampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan, dengan total

kerugian ekonomi mencapai 29,99 miliar rupiah dan kerusakan lingkungan seluas 207.591 hektare. Oleh karena itu, karhutla menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana di daerah ini, bersamaan dengan ancaman banjir yang juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Penanggulangan karhutla memerlukan perhatian serius dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019. Upaya pencegahan mencakup deteksi dini, patroli rutin, serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemadaman kebakaran memerlukan peralatan yang memadai dan koordinasi lintas sektor, sementara penanganan pasca-kebakaran melibatkan rehabilitasi ekosistem dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Mengingat kompleksitas permasalahan karhutla, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mitigasi dan penanggulangan agar bencana ini tidak terus berulang di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “administration”, dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage (mengelola). Administrai juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “administratie”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan clerical work (Silalahi, 2013)

Istilah manajemen berasal dari kata *ménagement* dalam bahasa Prancis kuno, yang diterjemahkan sebagai “seni melaksanakan dan mengatur”. Sementara dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu mengurus, mengemudikan, mengelola, dan mengatur. Sebagaimana halnya dengan administrasi, istilah manajemen juga berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “*mantis*”

yang memiliki arti tangan dan “agree” yang berarti melakukan. Kedua kata tersebut digabungkan menjadi kata kerja “managere” yang berarti menangani. Kata kerja “managere” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “to manage”, dengan kata benda “management” dan kata sifat “manager” untuk mereka yang melaksanakan kegiatan manajemen. Sehingga “management” diterjemahkan sebagai manajemen atau pengelolaan dalam bahasa Indonesia. (Rohman 2017)

Manajemen bencana menurut Kusumasari (dalam Alghifari and Yuliani 2020) didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana. Adapun manajemen bencana menurut Nurjanah (2012) sebagai proses dinamis tentang bekerjanya fungsi fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Adapun cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Menurut Sukma (dalam Adiyoso 2018) penyelenggaraan pengelolaan bencana atau manajemen bencana dibagi menjadi 3 tahapan yakni tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat, dan tahap pascabencana. Tahap prabencana dibagi menjadi 2 situasi yakni; situasi tidak ada bencana dengan indikator perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, penelitian, penataan tata ruang. Dan situasi terdapat potensi bencana dengan indikator mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan. Kemudian pada tahapan saat tanggap darurat terdapat indikator berupa kajian cepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan. Kemudian pada tahapan pascabencana melibatkan rehabilitasi tindakan dan rekonstruksi dengan indikator prasarana, sosial, kesehatan, kamtib, dan lingkungan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendefinisikan kebakaran hutan dan lahan sebagai suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak kendali. Berbeda dengan kebakaran hutan, jika api melahap bahan bakar bervegetasi yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali di kawasan bukan hutan maka disebut kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai kejadian dimana api melahap bahan

bakar bervegetasi, yang terjadi di kawasan hutan dan non-hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. (Syaufina, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell dalam (Kusumastuti dan Khoiron 2019), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dipikirkan oleh sejumlah orang atau kelompok orang tentang masalah sosial atau kemanusiaan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu, yang terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. Alasan peneliti memilih Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu daerah yang sering terjadi kebakaran dan memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun belum ada tindakan yang tepat dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk memaksimalkan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) di Kabupaten Indragiri Hulu

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Menurut Sudibyakto (2012), lemahnya perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman pemerintah daerah yang menganggap bahwa institusi yang menangani bencana, dalam hal ini adalah KPBD, hanya berfungsi saat bencana terjadi. Akibatnya, perencanaan penanggulangan bencana pada fase pra-bencana, yang mencakup pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tidak dianggap sebagai prioritas. Dengan kata lain, perencanaan penanggulangan bencana cenderung bersifat reaktif daripada proaktif.

Untuk mengetahui terkait indikator perencanaan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara terkait rencana strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Penanggulangan

Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu sebagai berikut:

“Untuk rencana strategi mencegah sebelum adanya karhutla dalam hal ini di bagian pra bencana KPBD sudah ada membuat dokumen kajian resiko bencana pada tahun anggaran 2023, di dalam dokumen tersebut telah di petakan kondisi daerah dan terdapat kajian dengan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan.” **(Wawancara dengan Kepala Seksi Pra Bencana, Bapak Fikri Gushendri, pada tanggal 15 Juli 2024)**

Pengorganisasian penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap suatu kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang oleh pimpinan kepada staff dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Proses pengorganisasian merupakan suatu proses pengklasifikasian orang orang dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peneliti melakukan wawancara terkait indikator pengorganisasian dalam manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) yaitu sebagai berikut:

“Jadi untuk pembagian kerjanya kita berdasarkan tugasnya masing-masing di tiap bidang, di pra bencana tugas kita berfokus pada usaha sebelum terjadinya bencana dan untuk pembagian tugasnya dari kasi ke anggota, jadi nanti kita menugaskan tim dari KPBD untuk melakukan sosialisasi dan patroli mandiri turun ke masyarakat. Dan juga kita bekerjasama dalam bentuk patroli bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP, Manggala Agni, dan pihak lainnya, dalam melakukan sosialisasi kita menghimbau ke masyarakat terkait larangan dalam membakar.” **(Wawancara dengan Kepala Seksi Pra Bencana Bapak Fikri Gushendri, pada tanggal 15 Juli 2024)**

Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Kepemimpinan dalam penelitian ini yaitu terdapat proses kepemimpinan yang terdiri dari pelatihan, pembinaan dan pengarahan kepada pegawai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara terkait indikator kepemimpinan yaitu dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada pegawai KPBD Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut:

“Kami KPBD Kab Inhu setiap tahun sudah tiga tahun terakhir pasti mengadakan pelatihan kepada anggota anggota kami untuk meningkatkan SDM mereka dalam

penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, kami juga selalu membuat apel gladi yang bertujuan untuk mengecek peralatan dan personil agar selalu siap siaga setiap saat, karena biasanya kami selalu menetapkan status siaga dari awal tahun hingga akhir tahun”.

(Wawancara dengan Kepala Seksi Pra Bencana, Bapak Fikri Gushendri pada tanggal 15 Juli 2024).

Pengkoordinasian merupakan upaya melakukan koordinasi terkait sumber daya manusia agar dapat berperan serta dengan baik dan menyeluruh dari suatu kegiatan dalam hal ini penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pengkoordinasian merupakan aspek yang penting karena melibatkan komunikasi untuk mengalokasikan wewenang dari atasan kepada bawahan sehingga kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dapat berjalan dengan lancar.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara terkait pengkoordinasian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

“Untuk koordinasi dari kita sendiri di kedaruratan ini tentunya dalam pemadaman di lapangan itu ya, jadi dilakukan berjenjang mulai dari korlap ke wakorlap, lalu ke danton baru ke anggota bawahnya. Dalam menanggulangi karhutla ini kita tidak bisa sendiri, kita berkoordinasi dengan jajaran pemerintah seperti tni, polri, manggala agni, satpol pp, dan semua pihak yang tergabung di dalam satgas komando. Jadi pada tahun 2024 ini sudah ada SK Satgas Komando Karhutla, itulah yang menjadi dasar kita dalam berkoordinasi. Koordinasi kita itu selain sama pemerintah tentunya bersama dengan masyarakat karena kan mereka sebagai ujung tombak untuk melakukan pemadaman dini, terus juga perusahaan ini berkoordinasi untuk menjaga area sekitarnya dan membantu bila terjadi kebakaran”.

(Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekontruksi Bapak Amrianto, pada tanggal 15 Juli 2024).

Pengendalian adalah upaya kontrol, evaluasi dan monitoring/pemantauan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai efisiensi suatu organisasi. Pengendalian berfungsi untuk mengetahui bagaimana kegiatan itu bekerja, dan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan sehingga dapat ditentukan langkah perbaikan untuk selanjutnya. Pengendalian dalam penelitian ini yaitu pemantauan terhadap sumber daya manusia dari Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan pelaksanaan evaluasi dari KPBD.

Untuk indikator pengendalian, peneliti melihat dari evaluasi yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) dengan melakukan wawancara yaitu sebagai berikut:

“Kita melakukan evaluasi berjenjang, evaluasi kita itu pertama ada pra bencana, jadi sebelum adanya bencana itu kita melakukan patroli, sosialisasi, dan mendeteksi desa rawan bencana dan setelah itu kita melakukan evaluasi. Dan kedua evaluasi setelah kita melakukan pemadaman, evaluasi bisa dilakukan dilapangan terkait sdm seperti personil dan peralatan yang kurang dan jika pemadaman belum selesai pada hari itu maka kita akan membahas persiapan untuk pemadaman di hari berikutnya”. **(Wawancara dengan Kepala Seksi Pra Bencana pada tanggal 15 Juli 2024).**

Pengawasan merupakan fungsi dalam manajemen sebagai proses penentuan untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan. Proses ini mencakup standar apa yang sedang dilakukan dalam pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan memastikan sumber daya manusia (SDM) dari KPBD bekerja dengan benar sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengawasan dalam penelitian ini untuk memastikan pegawai bekerja dengan benar dengan penentuan standar terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari KPBD berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk mengetahui terkait pengawasan dalam manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh KPBD Kabupaten Indragiri Hulu, peneliti melakukan wawancara terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu sebagai berikut:

“Kita dalam melaksanakan tupoksi ini mengacu pada SOP yang ada, SOP itu jadi dasar kita paling awal dalam bergerak, kalo terkait pengawasan pada SOP nya ya itu seperti di lapangan korlap yang memantau dan ngarahin tim sesuai SOP kita dan saya rasa selama ini kita udah bekerja cukup baik sesuai dengan SOP yang ada itu tadi dan kalo untuk SPM ini tentu kita juga dalam melakukan pelayanannya sesuai standar yang ada”. **(Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekontruksi, Bapak Amrianto, pada tanggal 15 Juli 2024).**

Penganggaran merupakan proses yang digunakan untuk menentukan atau menyusun anggaran tersebut. Penganggaran menjadi suatu bagian terpenting untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pengelolaan anggaran secara menyeluruh berfungsi sebagai penghubung dari proses perencanaan, operasional, pemeliharaan, pemanfaatan sampai pada proses kontrol, evaluasi dan monitoring dalam manajemen bencana kebakaran hutan dan

lahan. Penganggaran membantu dalam menentukan alokasi dana untuk berbagai kegiatan mulai dari pencegahan, pembelian peralatan, pelatihan personil, dan operasional lapangan.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara terkait penganggaran dengan informan untuk mengetahui terkait ketersediaan anggaran dari Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut:

“Kalo untuk anggaran yang dimiliki saat ini dikatakan masih cukup kurang, masih terbatas lah ya anggaran itu. Memang ada anggarannya untuk penanggulangan bencana itu, per kegiatan itu sudah ada anggaran masing-masingnya, tapi kalo untuk dibilang cukup sepertinya belum”. **(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Aprianto, pada tanggal 15 Juli 2024).**

Keuangan dalam penelitian ini yaitu terkait sumber dana yang dimiliki Kantor Penanggulangan Bencana Daerah yang digunakan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berikut peneliti melakukan wawancara mengenai indikator keuangan yaitu sumber dana yang dimiliki Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut:

“Sumber dana kita KPBD ini untuk penanggulangan bencana itu bersumber dari APBD terus juga dibantu sumber dana lainnya”. **(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Aprianto, pada tanggal 15 Juli 2024).**

Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu

Faktor internal merupakan aspek yang memengaruhi suatu organisasi yang berasal dari dalam organisasi yaitu dalam hal ini instansi yang melaksanakan manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun faktor internal yang menjadi penghambat KPBD Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu sebagai berikut:

Berikut peneliti melakukan wawancara terkait hambatan internal yang dihadapi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut:

“Pada saat pelaksanaan sering terjadi kendala diantaranya jumlah kejadian bencana karhutla yang sangat banyak, hingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemadaman dengan jumlah anggaran yang tidak mencukupi. Anggaran yang ada itu cukup terbatas hingga jadi permasalahan karena jumlah personil yang melaksanakan pemadaman karhutla harus

mempersiapkan alat pelindung diri, belanja makan dan minum selama pemadaman, belanja bahan bakar kendaraan operasional, belanja bahan bakar mesin portable dan honorarium pemadaman karhutla, yang mana hal tersebut diperkuat dengan lokasi tempat kejadian bencana karhutla yang sangat jauh dan pelaksanaan pemadaman karhutla yang harus dilakukan selama sehari-hari”. **(Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekontruksi, Bapak Amrianto, pada tanggal 15 Juli 2024)**

Faktor eksternal adalah faktor yang memengaruhi yang berasal dari luar organisasi, faktor tersebut bisa berasal dari kondisi masyarakat atau wilayah sekitar yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini yaitu faktor dari luar yang menjadi hambatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan yaitu sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Kepala Seksi Kedaruratan, Rehabilitasi, Rekontruksi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Amrianto, S.Sos., mengenai faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut:

“Hambatan eksternal yang kami rasakan saat pemadaman itu dari medan yang akan kita tempuh itu ya seperti jauhnya jarak tempuh menuju titik lokasi kebakaran, dan juga untuk melakukan pemadaman itu seringkali terkendala seperti sulitnya akses untuk mendapatkan sumber air yang mana kebakaran ini kan seringnya terjadi di musim kemarau”. **(Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekontruksi Bapak Amrianto, pada tanggal 15 Juli 2024).**

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh KPBD Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik berdasarkan indikator teori manajemen bencana menurut Neil Grig. Dalam perencanaan, terdapat strategi pencegahan melalui sosialisasi, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini. Pengorganisasian berjalan efektif dengan pembagian tugas yang jelas antara Seksi Pra Bencana dan Seksi Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Kepemimpinan didukung oleh pelatihan pegawai, meskipun masih terbatas pada pelatihan dasar tahunan. Koordinasi internal dan eksternal dilakukan secara berjenjang bersama Satgas Komando Pengendalian Karhutla, perusahaan perkebunan, dan masyarakat. Pengendalian SDM telah dilakukan dengan evaluasi

rutin baik saat terjadi bencana maupun tidak. Pengawasan berjalan dengan mengacu pada SOP dan SPM, meskipun terkendala keterbatasan SDM dengan kemampuan teknis kebencanaan. Namun, aspek penganggaran masih kurang memadai karena keterbatasan dana, yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan Karhutla. Sumber dana utama berasal dari APBD dan DBH-DR. Hambatan yang peneliti temui dalam manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan yaitu anggaran yang cukup terbatas dan keterbatasan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan yaitu sulitnya medan tempuh, dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen bencana pengantar & isu-isu strategis*. Bumi Aksara.
- Alghifari, G. R., & Yuliani, F. (2012). Manajemen bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, 7(1), 1–15.
- Arsyad, M. K. (2017). *Modul manajemen penanggulangan bencana*. Kemen PUPR RI.
- Baihaki, M., Khikmawanto, K., & Arief, M. (2023). Manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi banjir di Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2861–2874.
- Danil, M. (2021). Manajemen bencana. *Prosiding Mitigasi Bencana, Universitas Dharmawangsa* (November), 7–14.
- Darwiati, W., & Tuheteru, F. D. (2010). Dampak kebakaran hutan terhadap pertumbuhan vegetasi. *Jurnal Mitra Hutan Tanaman*, 3(1), 27–32.
- Gie, T. L. (1980). *Dasar-dasar administrasi: Suatu kumpulan karangan di daerah*. Pradnya Paramita.
- Ginanjar, K. (1997). *Administrasi pembangunan, perkembangan, pemikiran, dan praktiknya di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata ruang air*. Andi.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Nurjanah, D., Kuswanda, D., & Siswanto, A. (2012). *Manajemen bencana*. Alfabeta.

- Oktavianty, P. A., Maulana, E., & Akbar, M. (2024). Manajemen penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Administraus*, 8(2), 80–91.
- Pasolong, H. (2012). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Patma, Subali, T., Maskan, M., & Mulyadi, K. (2019). *Pengantar manajemen*.
- Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen bencana dalam penanganan pasca bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1).
- Robbins, S. P. (1982). *Personnel, the management of human resources*. Prentice-Hall.
- Rohman, Abd. (2017). *Dasar-dasar manajemen*. Inteligencia Media.
- Rohman, S. N., Lituhayu, D., & Lestari, H. (2024). Manajemen penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–19.
- Saqinah, N. W., & Nasution, B. (2019). Strategi komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1–12.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi pembangunan, konsep, dimensi dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2013). *Asas-asas manajemen* (Cetakan Kedua). PT. Refika Aditama.
- Simon, H. A., Smithburg, D. W., & Thompson, V. A. (1950). *Public administration*. Alfred A. Knopf.
- Sudibyakto. (2011). *Manajemen bencana di Indonesia kemana?* Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi. (2018). *Pengantar manajemen dan aplikasinya*. Penerbit Gaya Media.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar manajemen*. CV. Mandar Maju.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51–61.
- Tead, O. (1951). *The art of administration*. McGraw-Hill.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana Media.
- Widiana, E. M. (2020). *Buku ajar pengantar manajemen*. CV. Pena Persada.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar manajemen mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien*. Perdana Publishing.

- Yanti, F., & Meiwanda, G. (2022). Manajemen bencana banjir di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 2(2), 8–13. <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v2i2.30>
- Zulkarnaini, Z., & As'ari, H. (2019). Diseminasi peraturan desa (perdes) untuk pencegahan kebakaran lahan gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 75–82.
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. (2022). Institutional synergy in sustainable peatland management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 420–424.